

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

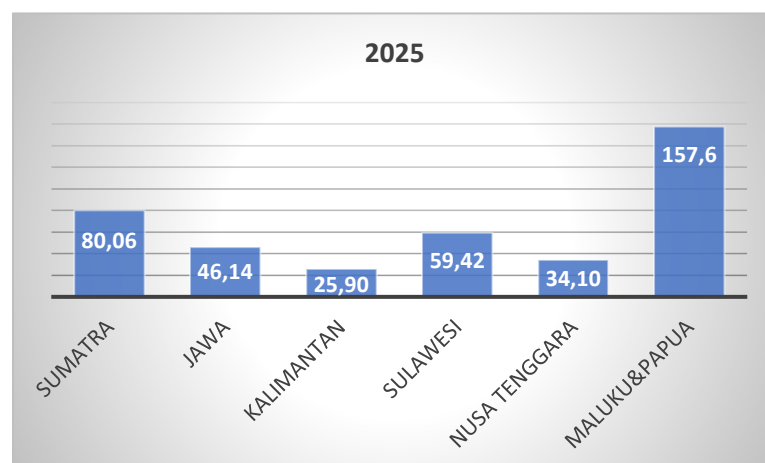
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kajian ekonomi pembangunan, Todaro dan Smith (2003) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dinilai semata-mata dari peningkatan pendapatan nasional, melainkan harus dilihat dari kemampuan pembangunan tersebut dalam mengurangi kemiskinan. Kemiskinan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas dan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah (Kevin et al., 2022).

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh banyak negara di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju. Bank dunia mendefinisikan bahwa kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal layak. Meskipun secara global jumlah penduduk miskin menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa dekade terakhir, kemiskinan tetap bersifat multidimensional dan penyebarannya tidak merata antar wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selama dua dekade terakhir perekonomian di Indonesia mencatat pertumbuhan yang relatif stabil, namun penurunan tingkat kemiskinan berlangsung secara bertahap dan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh karakteristik struktural daerah, kualitas sumber daya manusia, struktur ketenagakerjaan dan tingkat ketimpangan pendapatan.

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari enam kawasan kepulauan yaitu kepulauan Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Setiap kawasan memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda sehingga tantangan pembangunan tidak selalu merata di setiap wilayahnya (Rahmadi & Parmadi, 2019).

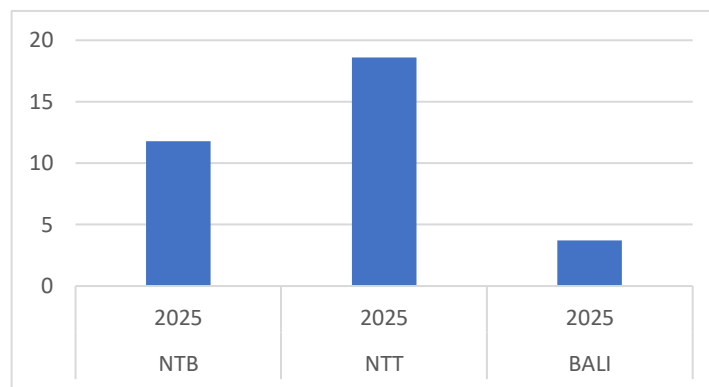
Berikut ini gambar perbandingan tingkat kemiskinan di kepulauan Indonesia sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah, 2026

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Kepulauan Indonesia (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa adanya variasi yang cukup nyata antar pulau besar. Kepulauan Nusa Tenggara merupakan salah satu kawasan yang menunjukkan karakteristik kemiskinan yang berbeda dibandingkan Maluku & Papua, Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan. Meskipun tidak menempati peringkat tertinggi secara nasional, tingkat kemiskinan di kepulauan nusa tenggara relatif masih lebih tinggi dibandingkan Kalimantan. Berikut gambar perbedaan tingkat kemiskinan di kepulauan Nusa Tenggara:



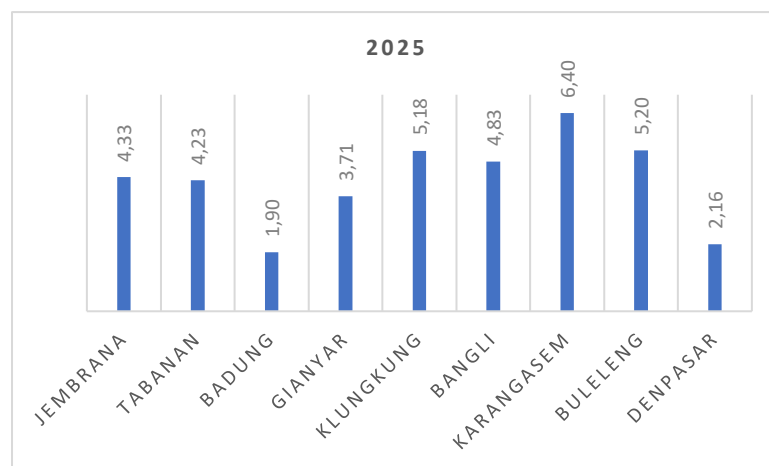
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah, 2026

Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin di Kepulauan Nusa Tenggara (Persen)

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa pada tingkat provinsi di Kepulauan Nusa Tenggara, provinsi Bali menjadi tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat ketiga provinsi tersebut berada dalam satu kawasan geografis yang relatif berdekatan. Rendahnya tingkat kemiskinan di Bali tidak terlepas dari struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor jasa, khususnya pariwisata yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi dengan tingkat pendapatan relatif

lebih baik dibandingkan sektor pertanian tradisional yang masih mendominasi NTB dan NTT. Selain itu, kualitas sumber daya manusia di Bali yang tercermin dari partisipasi tenaga kerja dan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi turut berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Ditinjau dari aspek demografi dan geografis, provinsi Bali memiliki tingkat aksesibilitas infrastruktur, pasar, dan layanan publik yang relatif lebih merata sehingga mendorong aktivitas ekonomi lebih inklusif. Sebaliknya, kondisi geografis NTB dan NTT yang relatif tersebar serta keterbatasan infrastruktur menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, rendahnya tingkat kemiskinan secara agregat di provinsi Bali tidak serta-merta mencerminkan ketiadaan permasalahan kemiskinan, hal ini dapat dilihat pada gambar 1.3 sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah, 2026

Gambar 1. 3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Bali (Persen)

Dari gambar 1.3 menunjukkan bahwa pada tingkat kabupaten/kota masih terdapat disparitas tingkat kemiskinan yang menunjukkan adanya

ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam provinsi. Kondisi ini mencerminkan adanya paradoks pembangunan di provinsi Bali yaitu keberhasilan dalam menekan tingkat kemiskinan secara umum yang belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan antar wilayah. Hal ini sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, serta distribusi pendapatan yang lebih adil berpotensi menghasilkan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Bali.

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas menjelaskan bahwa kabupaten Karangasem, Buleleng dan Klungkung memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pariwisata. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan, struktur sektor ekonomi serta kualitas sumber daya manusia antar wilayah dalam satu provinsi.

Salah satu pendekatan dalam pembangunan wilayah adalah pengembangan daerah yang didasarkan pada pemerataan sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan dan teknologi yang bertujuan untuk pemerataan pertumbuhan antar wilayah dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Daerah yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi seharusnya memperoleh efek penyebaran dari aktivitas ekonomi yang

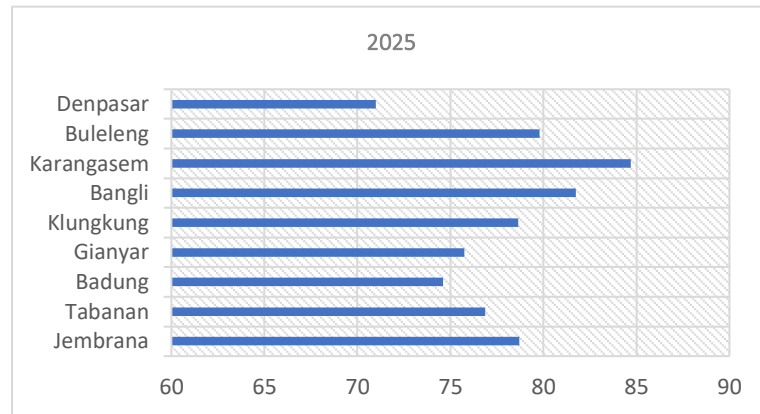
berkembang di pusat tersebut, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan wilayah sekitarnya (Fudhail et al., 2021).

Meskipun Bali dikenal sebagai daerah pertumbuhan ekonomi yang kuat, dinamika kemiskinan tidak hanya bisa dijelaskan melalui indikator makro, tetapi diperlukan peninjauan mendalam terhadap variabel sosial-ekonomi untuk membentuk kesejahteraan masyarakat. Faktor struktural yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Bali yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Aspek Pendidikan, Kontribusi Sektor Pertanian dan Ketimpangan Pendapatan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan, sehingga mencerminkan seberapa baik pasar tenaga kerja bisa menyerap orang-orang produktif. (Maulina & Andriyani, 2020)

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator untuk menganalisis kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah, karena mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Daerah dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih besar dalam menekan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Berikut ini disajikan grafik partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada periode terakhir sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah, 2026

Gambar 1. 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali (Persen)

Berdasarkan gambar 1.4 di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja terlihat adanya variasi yang cukup signifikan antar wilayah. Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli tercatat memiliki TPAK relatif tinggi dibandingkan daerah lain. Sedangkan Kota Denpasar dan Badung menunjukkan relatif lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten lainnya. Kondisi ini dikaitkan dengan karakteristik wilayah perkotaan dan pusat pariwisata di mana sebagian penduduk masih menempuh pendidikan serta adanya kelompok penduduk pendapatan relatif tinggi sehingga tidak seluruh penduduk usia kerja terdorong untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Namun, lapangan kerja di wilayah ini umumnya berada pada sektor jasa modern dengan tingkat produktivitas dan upah yang lebih tinggi, sehingga berkontribusi pada rendahnya tingkat kemiskinan. Peningkatan partisipasi tenaga kerja yang disertai dengan perbaikan kualitas pekerjaan dan

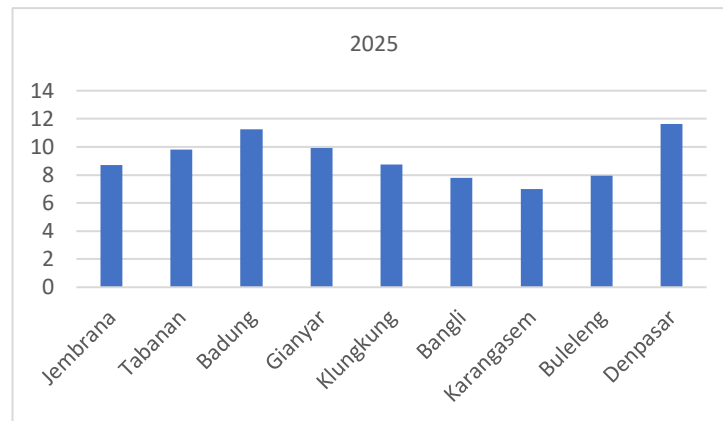
pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Fadhilah et al., 2023).

Ketika TPAK turun maka jumlah penduduk yang tidak terlibat dalam kegiatan produktif bisa meningkat sehingga bisa memperbesar risiko kemiskinan, sebaliknya jika TPAK tinggi terutama selama pemulihan ekonomi setelah pandemi tekanan terhadap kemiskinan cenderung berkurang. Hal ini tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi bagian penting untuk menilai penyebab kemiskinan di Bali. Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan (Pangestu Darmawan, 2023).

Pendidikan merupakan salah satu determinan utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja. Dalam kerangka ekonomi pembangunan, peningkatan pendidikan memungkinkan individu untuk mengakses kesempatan kerja yang lebih baik dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Aspek pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan bahwa Rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas, sehingga mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih produktif. Semakin tinggi RLS suatu wilayah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani (Fahrurrozi et al., 2023).

Berikut grafik periode terakhir Rata-rata lama sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah, 2026

Gambar 1. 5 Rata-Rata Lama Seklolah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali (Tahun)

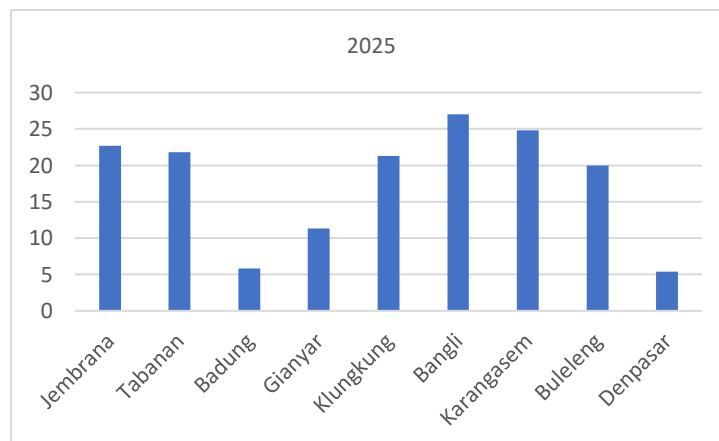
Berdasarkan Gambar 1.5 rata-rata lama sekolah kabupaten/kota provinsi Bali tahun 2025 menunjukkan bahwa Kota Denpasar dan kabupaten badung secara konsisten mencatat RLS tertinggi, mencerminkan akses pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya, kabupaten Karangasem, Bangli dan Buleleng memiliki nilai RLS relatif lebih rendah. Perbedaan capaian pendidikan ini mengindikasikan adanya ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar wilayah yang dapat memengaruhi perbedaan kesempatan kerja dan tingkat pendapatan, serta menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan tingkat kemiskinan di provinsi Bali. Kesenjangan ini bisa memperburuk tingkat kemiskinan terutama di daerah dengan Rata-rata lama sekolah yang rendah, jika tingkat pendidikan rendah maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan formal menjadi terbatas. Sebaliknya jika Rata-rata lama sekolah lebih tinggi biasanya memiliki akses lebih baik ke depannya sehingga bisa

menekan angka kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Novita (2024) menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Kontribusi sektor pertanian di provinsi Bali menjadikan sumber pendapatan utama bagi masyarakat di daerah pedesaan, kontribusi sektor pertanian dapat dihitung dengan PDRB sektor pertanian menurut harga berlaku terhadap PDRB kabupaten/kota, sehingga menunjukkan seberapa besar persentase ketergantungan wilayah pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian.

Kontribusi sektor pertanian selain menunjukkan perbedaan struktur ekonomi antar wilayah tetapi juga memberikan gambaran seberapa jauh transformasi ekonomi bisa menurunkan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. Peningkatan produktivitas pertanian secara statistik terbukti bahwa efektif untuk mengurangi kemiskinan (Khafidzin & Istifadah, 2020)

Berikut gambar kontribusi sektor pertanian di kabupaten/kota provinsi Bali sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah, 2026

Gambar 1. 6 Kontribusi Sektor Pertanian (Persen)

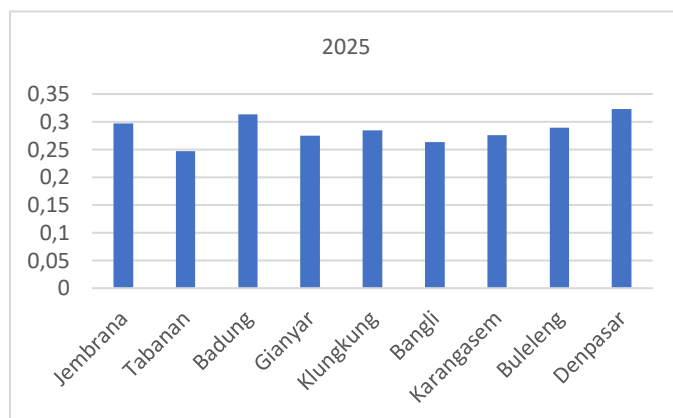
Kontribusi Sektor Pertanian di atas menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang cukup mencolok antar kabupaten/kota selama 1 tahun terakhir. Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem memiliki kontribusi sektor pertanian paling tinggi dibandingkan wilayah lain, hal ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian di kedua daerah tersebut masih sangat bergantung pada aktivitas pertanian. Sedangkan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Gianyar menunjukkan kontribusi sektor pertanian yang relatif rendah. Rendahnya peran sektor pertanian di ketiga daerah tersebut tidak terlepas dari dominasi sektor jasa, khususnya pariwisata dan perdagangan yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Perbedaan ini menegaskan bahwa adanya ketimpangan struktur ekonomi antar wilayah di provinsi Bali, di mana sebagian daerah telah mengalami transformasi ekonomi menuju sektor non-pertanian, sementara daerah lain masih bertumpu pada sektor pertanian. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian dengan nilai tambah rendah berpotensi mempertahankan kemiskinan, terutama apabila tidak didukung oleh modernisasi teknologi dan akses pasar yang memadai. Penelitian oleh Udi et al., (2023) dan Indra (2023) menemukan bahwa kontribusi sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah belum secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama apabila sektor pertanian didominasi oleh aktivitas berproduktivitas rendah, penggunaan teknologi serta terbatasnya nilai tambah yang diterima petani. Namun berbeda dengan

temuan oleh Siswantoro & Gandhi (2025) menyatakan bahwa kontribusi sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaruh sektor pertanian sangat bergantung pada karakteristik wilayah, tingkat produktivitas pertanian serta keterkaitan sektor pertanian dengan sektor ekonomi lainnya.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan penting dalam ekonomi pembangunan karena mencerminkan sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat bukan hanya segelintir orang, sehingga akan terciptanya fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan (Hababil et al., 2020). Menurut Todaro dan Smith pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh pemerataan pendapatan akan berpotensi memperlambat penurunan kemiskinan bahkan mempertahankan kemiskinan. Maka pengukuran ketimpangan pendapatan melalui Gini rasio menjadi indikator penting untuk melihat kualitas pembangunan ekonomi di suatu daerah.

Ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini rasio menunjukkan bahwa seberapa merata distribusi pendapatan masyarakat, di mana nilai yang mendekati angka 0 berarti pendapatan sangat merata sedangkan jika mendekati angka 1 menunjukkan bahwa ketimpangan yang besar.

Berikut gambar ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota provinsi Bali:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah, 2026

Gambar 1. 7 Gini Rasio Provinsi Bali (Indeks)

Berdasarkan gambar 1.7 di atas menunjukkan bahwa Gini rasio di kabupaten/kota berada di rentang 0,31-0,37 yang berarti ketimpangan pendapatan di Bali termasuk ke dalam kategori sedang, namun menunjukkan variasi antar wilayah. Kota Denpasar dan Kabupaten Badung cenderung memiliki nilai indeks lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih besar. Sedangkan Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli menunjukkan bahwa nilai indeks relatif lebih rendah sehingga mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan lebih merata, meskipun tidak selalu diikuti oleh tingkat kesejahteraan yang tinggi. Penelitian oleh Tope et al., (2025) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. semakin tinggi ketimpangan pendapatan maka semakin besar kemungkinan kelompok masyarakat berpendapatan rendah tidak memperoleh manfaat optimal pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian fenomena dan kajian empiris sebelumnya, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan dinamika kemiskinan secara

lebih mendalam pada tingkat kabupaten/kota, khususnya di wilayah dengan tingkat pembangunan relatif maju seperti Bali. Kebaruan penelitian terletak pada analisis determinan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota dalam satu provinsi yang secara agregat memiliki tingkat kemiskinan rendah, namun masih menunjukkan disparitas kesejahteraan antar wilayah. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di daerah dengan tingkat pembangunan relatif maju, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Determinasi Kemiskinan di Provinsi Bali: Bukti Empiris dari Partisipasi Tenaga Kerja, Pendidikan, Kontribusi Sektor Pertanian dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2021-2025.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Partisipasi tenaga kerja, pendidikan, kontribusi sektor pertanian dan ketimpangan pendapatan secara parsial terhadap kemiskinan di provinsi Bali selama periode 2021-2025?
2. Bagaimana pengaruh Partisipasi tenaga kerja, pendidikan, kontribusi sektor pertanian, dan ketimpangan pendapatan secara bersama-sama terhadap kemiskinan di provinsi Bali selama periode 2021-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan di atas, maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi tenaga kerja, pendidikan, kontribusi sektor pertanian dan ketimpangan pendapatan secara parsial di provinsi Bali selama periode 2021-2025.
2. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi tenaga kerja, pendidikan, kontribusi sektor pertanian dan ketimpangan pendapatan secara bersama-sama di provinsi Bali selama periode 2021-2025.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan serta memperdalam pemahaman khusus mengenai permasalahan yang diteliti yaitu faktor yang mempengaruhi kemiskinan mencakup tenaga kerja, pendidikan, sektor pertanian dan ketimpangan pendapatan.
2. Bagi lembaga diharapkan dapat memberikan referensi yang memuat informasi pengembangan serta sebagai referensi penelitian dalam mengidentifikasi masalah yang serupa di bidang ekonomi regional dan kemiskinan.
3. Bagi pemerintah pusat maupun daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai faktor struktural mana yang perlu menjadi prioritas intervensi dalam peningkatan kualitas ketenagakerjaan, pendidikan, penguatan sektor pertanian dan pengendalian ketimpangan pendapatan.

4. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan atau melakukan replikasi di wilayah kepulauan lain di Indonesia.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Total lokasi penelitian ini adalah 9 Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali, 8 Kabupaten terdiri Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng dan 1 Kota yaitu Denpasar. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui *website* resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026 dengan perkiraan pelaksanaan selama 9 bulan yaitu pada bulan Oktober 2025 sampai bulan Juni 2026.

Berikut ini tabel jadwal penelitian selama penelitian sebagai berikut:

